

# PERUBAHAN PARADIGMA PENCATATAN AKUNTANSI PASCA PERUBAHAN KEPALA PUSKESMAS DARI DOKTER KE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

Ahmad Muniri<sup>1</sup>, Halimatus Sakdiyah<sup>2</sup>, Evi Malia<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, Kompleks PP.

Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan <sup>1,2,3,4</sup>

Correspondent: [ahmadmuniri151219@gmail.com](mailto:ahmadmuniri151219@gmail.com)<sup>1</sup> [halimatussakdiyah270@gmail.com](mailto:halimatussakdiyah270@gmail.com)<sup>2</sup>  
[evimalia@gmail.com](mailto:evimalia@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstract

*The purpose of this study was to find out the accounting records that occurred after the change of the head of the health center from a doctor to another health worker. This type of research is descriptive qualitative using primary data, with data collection in the form of interviews, documentation and observation. The results of the study showed (1) The accounting records made by the Teja Pamekasan Health Center before and after the change of head of the puskesmas are still the same, namely recording LRA reports, reports on changes in excess budget balances, balance sheets, operational reports, cash flow reports, reports on changes in equity, and notes on financial reports, it's just that there have been changes or the paradigm in recording and using the budget that is caused by the regulations attached to the Puskesmas where the recording of the budget made by the Teja Pamekasan Health Center is more detailed and already exists in the rules, whereas after making changes the Head of the Puskesmas the budget recording can adjust to the needs at the Teja Pamekasan Health Center. (2) Before changing the Head of the Puskesmas, the Teja Pamekasan Health Center used Minister of Health Regulation No. 21 of 2016, after changing the head of the community health center, the Teja Pamekasan Community Health Center in its registration conformed to Perbup No. 7 of 2020, so that the records made by the Teja Pamekasan Health Center must comply with these regulations, not only that the budget has also been determined and the Puskesmas cannot change it.*

**Keywords:** Accounting Record, Recording Paradigm

## Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pencatatan akuntansi yang terjadi setelah adanya pergantian kepala puskesmas dari dokter ke nakes lain, jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer, dengan pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pencatatan akuntansi yang di buat oleh Puskesmas Teja Pamekasan sebelum dan sesudah pergantian kepala puskesmas masih sama yaitu mencatat laporan LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekitas, dan catatan atas laporan keuangan, hanya saja terjadi perubahan atau paradigma dalam pencatatan dan penggunaan anggaran belanjanya yang disebabkan oleh peraturan yang melekat pada Puskesmas yang mana pencatatan anggaran belanja yang di buat Puskesmas Teja Pamekasan lebih terperinci dan sudah ada dalam aturannya, sedangkan setelah melakukan pergantian Kepala Puskesmas pencatatan anggaran belanjanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Puskesmas Teja Pamekasan. (2) Sebelum melakukan pergantian Kepala Puskesmas, Puskesmas Teja Pamekasan menggunakan Permenkes No. 21 Tahun 2016, setelah melakukan pergantian kepala puskesmas, maka Puskesmas Teja Pamekasan dalam pencatatan nya menyesuaikan dengan Perbup No. 7 Tahun 2020, sehingga dalam pencatatan yang di buat oleh Puskesmas Teja Pamekasan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, tidak hanya itu dalam anggaran belanja juga sudah di tentukan dan Puskesmas tidak bisa mengubahnya.

**Kata Kunci:** Pencatatan Akuntansi, Paradigma Pencatatan

## PENDAHULUAN

Perubahan paradigma adalah perubahan asumsi dasar atas apa yang diyakini oleh seseorang. Paradigma itu sendiri merupakan cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Perubahan paradigma ini dapat terjadi pada puskesmas maupun entitas lainnya. Puskesmas merupakan penyedia fasilitas atau layanan kesehatan bagi masyarakat umum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dalam membina peran serta memberikan layanan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat. Perubahan paradigma pencatatan akuntansi yang terjadi pada puskesmas dapat disebabkan oleh pergantian kepala puskesmas. Pergantian Kepala Puskesmas saat ini menjadi isu hangat karena pergantian kepala Puskesmas yang awalnya dari dokter ketenaga kesehatan lainnya, seperti yang terjadi pada Puskesmas Teja Pamekasan.

Pergantian pemimpin ini merupakan proses aktivitas dalam suatu kelompok yang sudah terorganisasi dalam mencapai suatu tujuan untuk meningkatkan kinerja suatu entitas. Pergantian Kepala Puskesmas merupakan hal yang wajar bagi setiap puskesmas hal ini sebagai bentuk dinamika proses pembinaan agar puskesmas memiliki ide-ide yang kreatif dan berkembang dalam meningkatkan kinerjanya. Puskesmas merupakan penyedia layanan kesehatan yang mana perlu dilakukan peningkatan SDM dengan melakukan pergantian kepala puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat BAB VI Pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa, untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas harus memenuhi syarat diantaranya, berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (starata satu) atau D- 4 (diploma empat), pernah menduduki jabatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Dari peraturan tersebut dapat di disimpulkan bahwa yang menjabat sebagai kepala puskesmas tidak harus dokter melainkan tenaga kesehatan lainnya juga bisa menjabat sebagai kepala puskesmas asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan seperti diatas.

Melalui seni dalam kepemimpinan, akan menciptakan suatu komitmen organisasi, apakah patuh terhadap komitmen, atau tidak patuh terhadap komitmen. Dengan demikian secara terus menerus kebiasaan yang diterapkan seorang pemimpin dapat menciptakan suatu budaya dalam organisasi (Epriliyana, 2017).

Pencatatan akuntansi merupakan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mencatat semua transaksi dari aktivitas bisnis yang dilakukan sehingga membentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, puskesmas harus memiliki catatan atas laporan keuangan pada aktivitas yang dilakukan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang di jelaskan dalam Permendagri No.61 Tahun 2007 pasal 16. Menurut IAI dalam standart akuntansi keuangan (SAK) tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang dapat bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan suatu keputusan.

Berdasarkan permendagri No. 79 tahun 2018 menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang badan layanan umum daerah menyatakan bahwa badan layanan umum daerah (BLUD) adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Puskesmas yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga dalam hal akuntansi keuangan, BLUD memberikan keleluasan pengelolaan keuangan dan memberlakukan penggunaan anggaran berbasis kinerja serta sistem akuntansi berbasis akrual daripada penggunaan anggaran berbasis kas. Hal ini menjadikan perubahan anggaran dan system akuntansi menuju basis akrual masuk dalam bagian perubahan suatu instansi menjadi BLUD. Penggunaan anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk akuntabilitas dana dan transparansi penggunaan dana secara lebih baik. Oleh sebab itu, perubahan penggunaan anggaran tradisional dan sistem akuntansi berbasis kas menjadi penggunaan anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi berbasis akrual (Firdausi & Pujiningsih, 2018).

Setelah puskesmas menjadi BLUD maka sisa belanja anggaran yang ada di puskesmas dapat diakui sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya. Sehingga dengan dirubahnya menjadi BLUD, puskesmas tidak mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah daerah dan diharapkan mampu dalam mengelola keuangannya sendiri (Andriastuti & Yanto, 2019).

## **LANDASAN TEORI**

### **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, BAB VI tentang Organisasi dan Tata Hubungan Kerja, Pasal 40 menyatakan: 1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang undangan

### **Pencatatan Akuntansi**

Savitri (2018) menyatakan bahwa, pencatatan akuntansi harus sesuai dengan setiap transaksi yang terjadi dan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Sehingga dapat diartikan bahwa pencatatan akuntansi adalah segala aktivitas akuntansi baik dari pencatatan transaksi, pembukuan hingga menghasilkan data berupa laporan keuangan dari suatu entitas atau organisasi. Tujuan adanya pencatatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi yaitu: 1) Dapat memberikan penjelasan serta rincian dari pos yang telah disajikan kedalam Laporan Keuangan. 2) Memberikan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

### **Siklus Pencatatan Akuntansi**

Fitria (2014) menyatakan bahwa, siklus akuntansi adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan data keuangan yang sudah diproses sebelumnya dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi dalam sebuah entitas. Adapun tahap siklus akuntansi menurut Kieso (2016), yaitu: 1) Mengidentifikasi dan mencatat transaksi serta kejadian lainnya, 2) Pembuatan Jurnal, 3) Pemindahbukuan (Posting), 4) Neraca Saldo

### **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat sejalan dengan peraktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang mengelolanya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

### **Pencatatan Akuntansi BLUD Puskesmas**

Pada tanggal 2 Desember 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Berbasis AkruaI Nomor 13 Tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut pasal 5 ayat (2) PMK ini menjelaskan bahwa PSAP 13 ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Rahmayanti, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 pasal 44 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah. Laporan keuangan terdiri atas: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan Pernyataan.

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus pada pengamatan langsung yang terkait kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian kualitatif deskriptif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Peneliti disini mengumpulkan data berupa pencatatan akuntansi serta dokumen lainnya, untuk dianalisa apakah puskesmas tersebut memiliki perubahan paradigma pencatatan akuntansi setelah perubahan kepala puskesmas dari dokter ke nakes lain.

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data dan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama (informan inti) atau informasi yang diperoleh langsung dilokasi penelitian atau objek/subjek penelitian. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara langsung. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa bukti transaksi dan pencatatan akuntansi.

Reduksi data merupakan yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Langkah yang dilakukan

peneliti dalam mereduksi data yaitu melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi, sehingga memperoleh data berupa Pencatatan Akuntansi yang ada di Puskesmas Teja Pamekasan. Setelah mereduksi data, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data (*display*) merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan. Sedangkan fungsi dari *display* adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan yang telah dipahami. Setelah melakukan reduksi data langkah kedua dalam analisis data yaitu menyajikan data berupa pencatatan akuntansi dan catatan lainnya dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan peneliti di Puskesmas Teja Pamekasan dengan menganalisa indikator paradigma pencatatan apa saja yang terjadi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Paradigma pencatatan akuntansi merupakan sudut pandang seseorang atau pola pikir seseorang melakukan pencatatan akuntansi suatu aktivitas bisnis yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat BAB VI Pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa, untuk dapat diangkat sebagai kepala Puskesmas harus memenuhi syarat diantaranya, berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (starata satu) atau D- 4 (diploma empat), pernah menduduki jabatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Dari peraturan tersebut dapat di disimpulkan bahwa yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas tidak harus dokter melainkan tenaga kesehatan lainnya juga bisa menjabat sebagai Kepala Puskesmas asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan seperti diatas.

Paradigma atau pola pikir seorang pimpinan dalam pencatatan Akuntansi tidak berdasar pada profesinya namun berdasar atas peraturan yang menaungi instansinya, utamanya instansi pemerintah. Sebelum pergantian Kepala Puskesmas, Puskesmas Teja Pamekasan menyesuaikan dengan peraturan menteri kesehatan N0.21 tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama Milik Pemerintah Daerah yang mana dalam penggunaan belanjanya sudah terperinci dan Puskesmas tidak bisa menentukannya sendiri. Setelah melakukan pergantian Kepala

Puskesmas maka, Puskesmas Teja Pamekasan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati Pamekasan No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan sehingga dalam penggunaan belanja lebih fleksibel dan Puskesmas bisa menentukan sendiri dalam belanjanya.

Kepala Puskesmas sebelumnya dalam penggunaan belanja berfokus pada kebutuhan umum Puskesmas seperti belanja peralatan medis, belanja obat-obatan dan belanja ATK yang di sesuaikan dengan peraturan yang digunakan oleh Puskesmas yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Peratama Milik Pemerintah Daerah Bab IV pasal 5 menyatakan bahwa;

1. Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dimanfaatkan untuk, biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a. Belanja barang operasional terdiri atas, pelayanan kesehatan dalam gedung, pelayanan kesehatan luar gedung, operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor, administrasi, koordinasi program, sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan paradigma pencatatann akuntansi yang terjadi bukan disebabkan oleh profesinya sebagai kepala Puskesmas namun disebabkan oleh peraturan yang berlaku saat pejabat tersebut menjabat Kepala Puskesmas. Adanya perbedaan atau perubahan pencatatan maupun kebijakan akuntansi Kepala Puskesmas menyesuaikan dengan dasar aturan yang berlaku baik Puskesmas sebagai BLUD maupun tidak.

Puskemas Teja Pamekasan sebelum dan sesudah melakukan pergantian Kepala Puskemas memiliki paradigma atau pola pikir yang berbeda, namun paradigma tersebut bukan disebabkan oleh jabatan kepala Puskesmas tapi disebabkan oleh peraturan yang melekat pada Puskesmas Teja Pamekasan. Sehingga secara otomatis pergantian kepala Puskesmas selaras dengan perubahan peraturan yang berlaku. Paradigma pencatatan ditentukan oleh adanya perubahan peraturan yang diterapkan.

## SIMPULAN

Pencatatan akuntansi yang di buat oleh Puskesmas Teja Pamekasan sebelum dan sesudah pergantian kepala puskesmas masih sama yaitu mencatat laporan LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, hanya saja terjadi perubahan atau paradigma dalam pencatatan dan penggunaan anggaran belanjanya yang disebabkan oleh peraturan yang melekat pada Puskesmas yang mana pencatatan anggaran belanja yang di buat Puskesmas Teja Pamekasan lebih terperinci dan sudah ada dalam aturan nya, sedangkan setelah melakukan pergantian Kepala Puskesmas pencatatan anggaran belanjanya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Puskesmas Teja Pamekasan.

Sebelum melakukan pergantian Kepala Puskesmas, Puskesmas Teja Pemekasan menggunakan Permenkes No. 21 Tahun 2016, setelah melakukan pergantian kepala Puskesmas, maka Puskesmas Teja Pamekasan dalam pencatatan nya menyesuaikan dengan Perbup No. 7 Tahun 2020, sehingga dalam pencatatan yang di buat oleh Puskesmas Teja Pamekasan harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, tidak hanya itu dalam annggaran belanja juga sudah di tentukan dan Puskesmas tidak bisa mengubahnya

Bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian ini memiliki kelemahan atau keterbatasan dalam pengumpulan data, karena data yang diperoleh tidak didapat secara rinci sampai pada rincian pencatatan keuangannya namun hanya pada peraturan yang berlaku di Puskesmas Teja Pamekasan.

## Kutipan dan Referensi

- Afiyah, S., Arsy, A. A., & Engkus. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemesrintahan (Psap) Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibugel Kabupaten Sumedang. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1-8.
- Ash-Shiddiq, M. S. (2016). Analisis Penerapan PSAK NO.1 TEntang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Bachrun, E. (2017). Efektifitas Metode ABC (Activity Based Costing) Dalam Analisis Perencanaan Obat JKN di Puskesmas Dagangan Kabupaten Madiun. *Jurnal Kesehatan*, 1-7.
- Diamasturi, E. (2015). Paradigma ilmu pengetahuan sebuah telaah kritis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 1-14.

- Epriliyana, N. N. (2017). Sinergitas Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi dan Budaya Organisasi. *Jurnal Bidang Ilmu Ekonomi*, 1-11.
- Firdausi, R. Y., & Pujiningsih, S. (2018). Pemaknaan Perubahan Puskesmas X Menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Aspek Layanan dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Akrua*, 92-107.
- Ibid. (2009). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teknik. Hlm. 173.
- Kurniawanysah, D. (2016). Penerapan Pencatatan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM pada Desa Gembong Sari Kecamatan Kali Puro Kabupaten Banyuwangi. *Dinamika Global*, 832-841.
- Moleong, & Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moray, C. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. (2021). Analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 pada dinas kesehatan kota bitung. *Jurnal Emba*, 1-12.
- Niarti, U. (2018). Analisis Perbandingan Laba-Rugi pada CV. Maju Jaya Abadi. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, Vol.04 No.2*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standard Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13. (2015).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (2018).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standard Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua Pada Pemerintah. (2013).
- Proborini, A. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasar Murah Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di DKI Jakarta. *Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*.
- Putri, N. D., & Rahmizal, M. (2022, juli). Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Penjualan di Indoriva Online Pada PT.Multisukses Energi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 2 No.2*.
- Rahmayanti, A. (2018). Analisis Laporan Keuangan RSUP Persahabatan Berdasarkan PSAP No.13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum . *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1-21.
- Savitri, R. V., & Saifudin. (2018). Pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah. *Universitas Semarang* , 1-9.

- Shovia, T. R., Mutmainah, S., & Nikmatuniayah. (2020). Analisis Penerapan PSAP NO. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada UPTD Puskesmas Gunung Pati Semarang. *JURNAL AKTUAL AKUNTANSI KEUANGAN*, 89-101.
- Soemarso.S.R. (2015). *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi Empat* . Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Sriwoko, A. S. (2019). Sistem dan Prosedur Rumah Pangan Kita (RPK) Di Perum Bulog Divre Daerah Kota Palu . *Universitas Tadulako* .
- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukamtono, Ranihusna, D., & Widyastuti, R. (2022). Perubahan Jabatan Dampaknya Pada Kinerja dan Kesejahteraan . *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika*.
- Sumarsan, T. (2013). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: PT. Indeks.
- Suwandi, Rohmatun, Y., & Noviany. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Kali Jaga Permai. *Jurnal Akuntansi, Vol.15*, 17-27.
- Utari, R. (2009). Evaluasi Pelayanan Makanan Pasien Rawat Inap Di Puskesmas Gondangrejo Karanganyar. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-71.
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: yuma pustaka.